

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir pemerintahan orde baru merupakan langkah awal bagi Bangsa Indonesia untuk berpindah kebijakan yang semula kebijakan sentralisasi menjadi kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Penerapan desentralisasi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada era orde baru. Penyelenggaraan desentralisasi pemerintah di Indonesia dimulai sejak pada tahun 2001, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan pula dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004.

Melalui penerapan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Dampaknya bagi pemerintah daerah sangat besar dalam waktu tata kelola pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah. Sidik (2002) dalam Wirasatya menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya Pendapatan Asli Daerah. Brata (2004) dalam Wirasatya menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagian Sumbangan dan Bantuan. Sidik (2002) dalam Bakti menyatakan implikasi dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan kedaerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Daerah tidak mungkin diberi kepercayaan mengelola urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat tanpa didukung pendanaan yang memadai. Untuk itu perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk

membiayai kewenangan atau fungsi yang diserahkan ke daerah memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan.

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan pembangunan nasional. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik (Gouveia & Strauss 1994).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikarenakan atas permukaan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya diatas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Intinya pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dan bangunan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Bekasi terutama mengenai kontribusi PBB dan BPHTB terhadap pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Di Daerah Kota Bekasi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Berapa kontribusi PBB terhadap Pendapatan Di Daerah Kota Bekasi ?
- b. Bagaimana perbandingan kontribusi penerimaan PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Di Daerah Kota Bekasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui berapanyakontribusiPBB terhadap Pendapatan Di Daerah Kota Bekasi?
- b. Untuk mengetahui perbandingan kontribusi penerimaan PBB dan BPHTB Pendapatan Di Daerah Kota Bekasi?

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah secara akademis khususnya bagi penulis tentang bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah, dalam penelitian ini khususnya Pendapatan Di DaerahKota Bekasi, serta sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang perpajakan.

### 2. Bagi Pihak Dinas Pendapatan Daerah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Dispenda khususnya kota Bekasi, tentang bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah daerah bisa lebih mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya di sektor PBB dan BPHTB serta diharapkan bisa lebih bijak dalam mengalokasikan

sumber dana yang diterimanya baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi perpajakan, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Di Daerah Kota Bekasi.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, dibatasi masalah hanya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan periode tahun 2011 sampai dengan 2018 di Dispenda Kota Bekasi.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi pembahas skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan yaitu sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap penelitiannya, dan kerangka pemikiran pada penelitian ini.

### **BAB 3           METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB 4           ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, statistik deskriptif pengujian hipotesis serta pembahasan.

### **BAB 5           KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

